

ANALISIS PENGARUH KETERLAMBATAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN SKPD DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN ANGGARAN 2014

Serafiadita Devota Fridatama Renyut¹

tyta.renyut@yahoo.com

Transna Putra Urip. S²

transnaputra@yahoo.co.id

Robert M. WST. Marbun³

robert@ieuncen.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor Keterlambatan Penyusunan dan Penetapan APBD (Faktor-faktor tersebut antara lain Faktor SDM, Hubungan Eksekutif-Legislatif, Regulasi, indikator Kinerja dan Penetapan APBD) yang mempunyai pengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD T.A 2014 serta Upaya Pemerintah Daerah mengatasi Keterlambatan Penyusunan APBD. Jenis data yang digunakan yaitu data primer bersumber dari kuesioner. Objek penelitian adalah SKPD yang ada di Kabupaten Boven Digoel. Metode analisis data berupa Uji Regresi Berganda dan Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dari kelima factor keterlambatan penyusunan APBD hanya factor SDM dan Penetapan APBD yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan masing-masing nilai signifikan sebesar 0,04 dan 0,05. Secara keseluruhan perubahan Penyerapan Anggaran dapat dijelaskan factor-faktor tersebut sebesar 76,8% dan sisanya diluar model. Untuk mengatasi masalah keterlambatan penyusunan maka Pemerintah Daerah melakukan upaya sosialisasi pihak Bappeda dan pelatihan bendahara SKPD, Pergantian Kepala Bappeda serta menggunakan sistem Keuangan SIMDA.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif dan Legislatif, Regulasi, Indikator Kinerja, Penetapan APBD, Penyerapan Anggaran

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Tahun 1945 (UU No 32 Tahun 2004). Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di atas didanai oleh APBD. Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran. Landasan dalam penyusunan APBD adalah Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

¹ Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

² Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

³ Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

keuangan daerah, Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah. Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai berikut: (1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); (3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD); (4) Penyiapan Raperda APBD dan (5) Penetapan APBD, selain itu berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam penyusunan APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Adanya aturan yang berisikan jadwal tersebut belum mampu untuk mengatasi permasalahan keterlambatan yang tengah terjadi dalam penyusunan APBD di Indonesia sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat secara langsung mendanai proyek-proyek atau kegiatan yang sudah disusun pada SKPD.

Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu daerah yang mengalami keterlambatan dalam menyusun APBD. Permasalahan politik yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu penyebab terhambatnya proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD yaitu selama beberapa tahun terakhir. Kepada Daerah/Bupati Kabupaten Boven Digoel masih merupakan Pelaksana Tugas yang dipegang oleh Wakil Bupati (2011-2014). Jabatan Sekertaris Daerah pun selama ini kosong dan dijabat oleh Pelaksana Tugas (2011-2014). Hal ini tentu akan menghambat jalannya pemerintahan.

Keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Boven Digoel terjadi pada tahun 2011-2014, APBD disahkan pada kurun waktu antara 1 Januari-18 April. Dengan adanya keterlambatan dalam penetapan APBD di Kabupaten Boven Digoel dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan dan pengesahan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD.

Tabel 1.
APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2013

Tahun	Komponen	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Belanja
2011	Pendapatan Belanja	Rp 804.503.159.851 Rp 818.208.887.289	Rp 791.751.255.014 Rp 782.886.927.981	96,70%
2012	Pendapatan Belanja	Rp 862.302.897.905 Rp 980.203.603.132	Rp 820.033.061.371 Rp 877.243.508.875	89,40%
2013	Pendapatan Belanja	Rp 949.152.892.552 Rp 1.003.637.303.136	Rp 912.717.466.464 Rp 943.860.158.981	94,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Boven Digoel.

Keterbatasan penyusunan serta pengesahan rancangan tentu akan berdampak pada penyerapan anggaran pada tiap SKPD yang ada di Kabupaten Boven Digoel. Program-program yang harusnya sudah dijalankan namun karena keterlambatan sehingga program tersebut berjalan kurang maksimal atau bahkan harus tertunda. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kinerja dari SKPD tersebut. Selain itu, penyerapan

anggaran pun tidak maksimal sehingga mengakibatkan dana yang harusnya dianggarkan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Data perbandingan APBD dan Realisasi APBD tahun 2011-2013 diperoleh nilai penyerapan anggaran berdasarkan total belanja tahun 2011 sebesar 96.7%, pada tahun 2012 penyerapan anggaran menurun menjadi 89.4%, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi menjadi 94%. Dari nilai penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa nilai penyerapan anggaran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011-2013 nilai penyerapan anggaran kurang dari 100%.

Adanya Keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD tidak terlepas dari factor yang mempengaruhinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wangi Citra & Ritonga Irwan (2010) tentang Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD dan Halim, Abdul (2013), tentang Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011, maka factor yang digunakan peneliti yaitu faktor Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksklusif dan Legislatif, faktor regulasi, faktor indikator kerja serta faktor penetapan anggaran itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi focus dalam studi ini yaitu (a) apakah ada pengaruh signifikan factor-faktor keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kabupaten Boven Digoel serta (b) bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah keterlambatan penyusunan anggaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Faktor-Faktor Keterlambatan Penyusunan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran SKPD Di Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2014 serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan keterlambatan penyusunan anggaran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Studi

Secara garis besar pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah adalah pendekatan kuantitatif berupa penjelasan table, persamaan dalam menjelaskan persoalan potensial yang sedang terjadi. Metode yang digunakan berupa analisis statistic. Serta Pendekatan kualitatif yang menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi keterlambatan penyusunan dengan metode analisis deskriptif.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan berupa data kusioner serta data sekunder berupa data yang diperoleh dari instansi pemerintah berupa data APBD dan realisasi serta data Penyerapan anggaran SKPD serta database

Kabupaten Boven Digoel. Data ini diperoleh dari BPKAD, Inspektorat serta Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Boven Digoel. Teknik utama dalam pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini yaitu kuesioner dan studi kepustakaan.

Analisis Data

Untuk mencapai tujuan yang dicapai maka penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data antara lain: Uji validitas dan reliabilitas instrument, analisis regresi berganda.

Uji Validitas Instrumen

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Untuk mengetahui tingkat validitas instrumen, maka dalam penelitian ini dapat menggunakan rumus (Sujarweni: 177):

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana: r = koefisien korelasi
 $\sum X_i$ = jumlah skor item
 $\sum Y_i$ = jumlah skor total
 n = jumlah responden

Dasar pengambilan keputusan:

- 1) Jika r hitung > r tabel, maka variabel tersebut valid
- 2) Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid

Uji Reliabilitas

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam kuisisioner (Sujarweni: 186).

Uji reliabilitas pada kuisisioner dalam penelitian secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menghitung koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach* dengan rumus (Sujarweni: 186):

$$\alpha = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Dimana :

α : koefisien reliability instrumen
k : banyaknya butir pertanyaan
 $\sum \sigma_b^2$: total varian butir
 σ_1^2 : total varians

Metode *alpha* diukur berdasarkan skala *alpha cronbach* 0 sampai 1. Jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan *rank yang sama*, maka ukuran kemantapan *alpha* dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai *alpha cronbach* 0,00 s/d 0,20 berarti kurang reliabel
- 2) Nilai *alpha cronbach* 0,21 s/d 0,40 berarti agak reliabel
- 3) Nilai *alpha cronbach* 0,41 s/d 0,60 berarti cukup reliabel
- 4) Nilai *alpha cronbach* 0,61 s/d 0,80 berarti reliabel
- 5) Nilai *alpha cronbach* 0,81 s/d 100 berarti sangat reliable

Analisis Regresi Ganda

Regresi linear ganda adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara lebih dari satu variabel bebas (X) dan satu variabel tak bebas (Y). Hubungan peubah-peubah tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan : (Widarjono: 103)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e_i$$

Keterangan:

- Y = Variabel Dependen (penyerapan anggaran)
- a = konstanta
- X₁ = Variabel Independen (Sumber Daya Manusia)
- X₂ = Variabel Independen (Hubungan Eksekutif dan Legislatif)
- X₃ = Variabel Independen (Faktor Regulasi)
- X₄ = Variabel Independen (Faktor Indikator Kinerja)
- X₅ = Variabel Independen (Penetapan APBD)

Hipotesis yang harus diuji dalam analisis regresi ganda adalah

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh masing-masing, yaitu variable Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD Hipotesis Variabel Faktor Penetapan APBD

H₀ : $\beta_n X_n = 0$, tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial variable-variabel X terhadap Penyerapan Anggaran

H_a : $\beta_n X_n \neq 0$, ada pengaruh yang signifikan secara parsial variable-variabel X terhadap Penyerapan Anggaran

Kriteria Pengujian:

Ho diterima, Nilai Kolom sig. > level of significant (α) = 0.05 = Tidak Signifikan

Ho ditolak, Nilai Kolom sig < level of significant (α) = 0.05 = Signifikan

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh Variabel Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD secara simultan terhadap Penyerapan Anggaran

Ho : $\beta_1X_1 = \beta_2X_2 = \beta_3X_3 = \beta_4X_4 = \beta_5X_5 = 0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan variable Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD secara simultan terhadap Penyerapan Anggaran

Ha : $\beta_1X_1 \neq \beta_2X_2 \neq \beta_3X_3 \neq \beta_4X_4 \neq \beta_5X_5 \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan variable Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD secara simultan terhadap Penyerapan Anggaran

Penentuan Level of significant (α) = 0.05

Kriteria pengujian:

Ho diterima jika Kolom sig > level of significant (α) = tidak signifikan

Ho ditolak jika Kolom sig < level of significant (α) = Signifikan

Untuk melakukan pendugaan parameter model regresi ganda dan menguji signifikansinya dapat dilakukan dengan program SPSS 21.

Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya kemampuan Variabel Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD untuk menjelaskan keragaman yang terdapat pada variabel Penyerapan Anggaran

Uji Asumsi Klasik

1. Multikolinearitas (korelasi antara variabel independen) adalah terjadinya hubungan linier antara variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. (Widarjono: 103). Metode yang banyak digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah faktor inflasi ragam (*Variance Inflation Factor /VIF*). Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF > 10
2. Heteroskedastisitas (variansi *error* konstan) adalah variansi dari error model regresi tidak konstan atau variansi antar error yang satu dengan yang lain berbeda (Widarjono: 115). Untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola jelas, serta titik-titik (sisaan) menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka **tidak terjadi heteroskedastisitas**.
3. Normalitas (error berdistribusi normal) dideteksi dengan menggunakan *normal p-p plot*. Jika titik-titik (sisaan) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model

regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika titik-titik (sisaan) menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

4. Autokorelasi (*error* bersifat acak) adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Autokorelasi seringkali terjadi pada data time series dan dapat juga terjadi pada data cross section tetapi jarang (Widarjono: 140). Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin –Watson :

- a. Bila angka Durbin – Watson berada dibawah -2, berarti ada autokorelasi.
- b. Bila angka Durbin – Watson diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Bila angka Durbin–Watson diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Dari kuesioner yang di bagi dalam rangka pengumpulan data sebanyak 45 eksemplar. Berikut Rekapitulasi terkait dengan Identitas Responden:

Tabel 2.
Rekapitulasi Identitas Responden

Keterangan	Responden	Jumlah Responden
Umur	26 – 30	3
	31 – 35	8
	36 – 40	7
	41 – 45	6
	46 – 50	9
	51 – 55	5
	56 – 60	7
Jenis Kelamin	Pria	32
	Wanita	13
Tingkat Pendidikan	SMA	5
	Diploma	4
	Sarjana	30
	Pasca Sarjana	6
Jabatan	Kepala Dinas	2
	Sekretaris	2
	Kepala Sub Bagian	8
	Kepala Bidang	9
	Kepala Seksi	8
	Bendahara	2
	Staf	14

Sumber : Hasil Survei, 2015

Uji Reliabilitas Instrumen

Table 3.
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variable	Nilai Alpha Cronbach	Kriteria
X1	0.613	Reliabel
X2	0.719	Reliabel
X3	0.271	Agak Reliabel
X4	0.679	Reliabel
X5	0.851	Sangat Reliabel
Y	0,847	Sangat Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Berdasarkan tabel Uji reliabilitas instrument maka variabel X5 dan Y sangat reliabel. Variable X1, X2 dan X4 reliabel dan variable X3 agak reliabel.

Uji Validitas Instrumen

Table 4.
Hasil Uji Validitas Instrumen

X1	Korelasi antara	r- hitung (Pearson Colleration)	r- tabel	Kesimpulan
	No.1 dengan Total	0.742	0.355	Valid
	No.2 dengan Total	0.749	0.355	Valid
	No.3 dengan Total	0.792	0.355	Valid
	No.4 dengan Total	0.764	0.355	Valid
	No.5 dengan Total	0.252	0.355	Tidak Valid
	No.6 dengan Total	0.634	0.355	Valid
X2	Korelasi antara	r- hitung (Pearson Colleration)	r- tabel	Kesimpulan
	No.1 dengan Total	0.722	0.355	Valid
	No.2 dengan Total	0.714	0.355	Valid
	No.3 dengan Total	0.275	0.355	Valid
	No.4 dengan Total	0.326	0.355	Tidak Valid
	No.5 dengan Total	0.326	0.355	Tidak Valid
	No.6 dengan Total	0.618	0.355	Valid

X3	Korelasi antara	r- hitung (Pearson Colleration)	r- tabel	Kesimpulan
	No.1 dengan Total	0.546	0.355	Valid
	No.2 dengan Total	0.329	0.355	Tidak Valid
	No.3 dengan Total	0.705	0.355	Valid
	No.4 dengan Total	0.610	0.355	Valid
	No.5 dengan Total	0.287	0.355	Tidak Valid
X4	Korelasi antara	r- hitung (Pearson Colleration)	r- table	Kesimpulan
	No.1 dengan Total	0.650	0.355	Valid
	No.2 dengan Total	0.785	0.355	Valid
	No.3 dengan Total	0.798	0.355	Valid
	No.4 dengan Total	0.511	0.355	Valid
	No.5 dengan Total	0.519	0.355	Valid
X5	Korelasi antara	r- hitung (Pearson Colleration)	r- table	Kesimpulan
	No.1 dengan Total	0.695	0.355	Valid
	No.2 dengan Total	0.842	0.355	Valid
	No.3 dengan Total	0.714	0.355	Valid
	No.4 dengan Total	0.786	0.355	Valid
Y	Korelasi antara	r- hitung (Pearson Colleration)	r- table	Kesimpulan
	No.1 dengan Total	0.860	0.355	Valid
	No.2 dengan Total	0.716	0.355	Valid
	No.3 dengan Total	0.858	0.355	Valid
	No.4 dengan Total	0.893	0.355	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Untuk mengukur tingkat validitas suatu instrument maka nilai r hitung harus lebih besar dari nilai r tabel sehingga instrument tersebut dapat dikatakan valid. Berdasarkan tabel hasil uji validitas Variabel-Variabel diatas maka instrument yang tidak valid tidak dihitung dalam proses analisis.

Regresi Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS Version 21.0, maka analisis regresi berganda data dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 5.
Koefisien

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.609	.582		1.046	.302
SDM	.303	.148	.386	2.047	.047
EKS-LEG	-.067	.171	-.042	-.394	.696
REGULASI	.046	.158	.027	.291	.773
IND. KINERJA	.118	.147	.186	.800	.429
PENETAPAN APBD	.341	.168	.359	2.024	.050

Sumber : Data Olahan SPSS 21, 2015

Dari table di atas dapat ditemukan Persamaan Regres berganda ini adalah:

$$Y = 0,609 + 0,303X_1 - 0,067X_2 + 0,046X_3 + 0,118X_4 + 0,341X_5 + e$$

- 0,609 adalah nilai konstanta, apabila variable lain tidak ada, maka nilai y atau Penyerapan anggaran sebagai konstanta.
- Variable X_1 mempunyai koefisien sebesar 0,303 maka variable X_1 (Sumber Daya Manusia) mempunyai pengaruh POSITIF terhadap Penyerapan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa variable tersebut memiliki peran untuk meningkatkan Penyerapan Anggaran, artinya semakin tinggi kapasitas Sumber Daya Manusia akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar konstanta ditambah $0,303X_1$ dengan asumsi variable lain tidak ada.
- Variabel X_2 mempunyai koefisien sebesar -0,0607 maka variable X_2 mempunyai pengaruh negative terhadap penyerapan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa variable tersebut tidak memiliki peran untuk meningkatkan Penyerapan Anggaran, artinya apabila hubungan Eksekutif dan Legislatif semakin baik maka penyerapan anggaran akan semakin menurun sebesar konstanta dikurangi 1.146 dengan asumsi variable lain tidak ada
- Variabel X_3 mempunyai koefisien sebesar 0.046 maka variable X_3 mempunyai pengaruh terhadap Penyerapan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa variable tersebut memiliki peran untuk meningkatkan Penyerapan anggaran, artinya bahwa apabila Regulasi semakin baik maka penyerapan anggaran akan meningkat sebesar konstanta ditambah $0.046X_3$ dengan asumsi variable lain tidak ada.
- Variabel X_4 mempunyai koefisien 0,118 maka variable X_4 mempunyai pengaruh positif terhadap Penyerapan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa variable tersebut memiliki peran untuk meningkatkan Penyerapan anggaran, artinya bahwa semakin baik SPKD menerjemahkan Indikator

Kinerja dalam proses penyusunan APBD maka akan menyebabkan penyerapan anggaran meningkat sebesar konstanta ditambah $0,118X_4$ dengan asumsi variable lain tidak ada.

- f. Variabel X_5 mempunyai koefisien 0,341 maka variable X_5 mempunyai pengaruh terhadap Penyerapan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa variable tersebut memiliki peran untuk meningkatkan Penyerapan anggaran, artinya apabila semakin Tepat APBD ditetapkan maka penyerapan anggaran semakin meningkat sebesar konstanta ditambah $0,341X_5$

Pengujian Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variable dependen. Uji t (Uji parsial) digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh masing-masing variable Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran.

**Tabel 6.
Koefisien**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.609	.582		1.046	.302
SDM	.303	.148	.386	2.047	.047
EKS-LEG	-.067	.171	-.042	-.394	.696
REGULASI	.046	.158	.027	.291	.773
IND. KINERJA	.118	.147	.186	.800	.429
PENETAPAN APBD	.341	.168	.359	2.024	.050

Sumber : Data Olahan SPSS 21, 2015

Kriteria Pengujian:

Ho diterima, Nilai Kolom sig. > level of significant (α) = 0.05 = Tidak Signifikan

Ho ditolak, Nilai Kolom sig < level of significant (α) = 0.05 = Signifikan

Berdasarkan kriteria pengujian Hipotesis maka variable X_1 (sumber Daya Manusia) memiliki nilai signifikan sebesar $0.047 < 0.05$ maka Ho ditolak, H_a diterima berarti faktor X_1 memiliki pengaruh terhadap Y. Variable X_2 (Hubungan Eksekutif-Legislatif) memiliki nilai signifikan sebesar $0.696 > 0.05$ maka Ho diterima, berarti faktor X_2 tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Variabel X_3 (Regulasi) memiliki nilai signifikan sebesar $0.773 > 0.05$ maka Ho diterima, berarti faktor X_3 tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Variabel X_4 (Indikator Kinerja) memiliki nilai signifikan sebesar $0.429 > 0.05$ maka Ho diterima berarti faktor X_4 tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Variable X_5 (Penetapan APBD)

memiliki nilai signifikan sebesar $0.0050 < 0.05$ maka H_0 ditolak, H_a diterima berarti factor X5 memiliki pengaruh terhadap Y.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh Variabel Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD secara simultan atau bersama-sama terhadap Penyerapan Anggaran

Uji Hipotesis:

$H_0 : \beta_1X_1 = \beta_2X_2 = \beta_3X_3 = \beta_4X_4 = \beta_5X_5 = 0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan variable Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD secara simultan terhadap Penyerapan Anggaran

$H_a : \beta_1X_1 \neq \beta_2X_2 \neq \beta_3X_3 \neq \beta_4X_4 \neq \beta_5X_5 \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan variable Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD secara simultan terhadap Penyerapan Anggaran

Penentuan Level of significant (α) = 0.05

Kriteria pengujian :

H_0 diterima jika Kolom sig > level of significant (α) = tidak signifikan

H_0 ditolak jika Kolom sig < level of significant (α) = Signifikan

Tabel 7.
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	106.433	5	21.287	25.757	.000 ^b
	Residual	32.232	39	.826		
	Total	138.665	44			

Sumber : Data Olahan SPSS 21, 2015

Dari table 7 dapat kita simpulkan terdapat pengaruh yang signifikan Variabel Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD secara simultan terhadap Penyerapan Anggaran. Ditunjukkan dengan Nilai Kolom Sig $0.000 < \text{level of significant } (\alpha) = 0.05$ Signifikan.

Koefisien determinasi

Analisis koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya kemampuan Variabel Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif Legislatif, Faktor Regulasi, Faktor Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD untuk menjelaskan keragaman yang terdapat pada variabel Penyerapan Anggaran

Tabel 8.
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.768	.738	.90910

Sumber : Data Olahan SPSS 21, 2015

Dari table 8. nilai Multiple R (Koefisien Korelasi) sebesar 0.876 menyatakan bahwa korelasi variable bebas terhadap variable terikat sebesar 87,6% yang berarti hubungannya positif dan kuat. R Square (Koefisien determinasi) menyatakan bahwa 76,8% perubahan pada variable terikat (Y) dapat dijelaskan oleh variable bebas, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable yang tidak masuk dalam model atau yang digunakan dalam penelitian ini

Pengujian Asumsi Klasik

- 1) Multikolinieritas (korelasi antara variabel independen). Multikolinieritas adalah terjadinya hubungan linier antara variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Hubungan linier antara variabel bebas dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna (perfect) dan hubungan linier yang kurang sempurna (imperfect) (Widarjono: 103).

Tabel 9.
Multikolinieritas

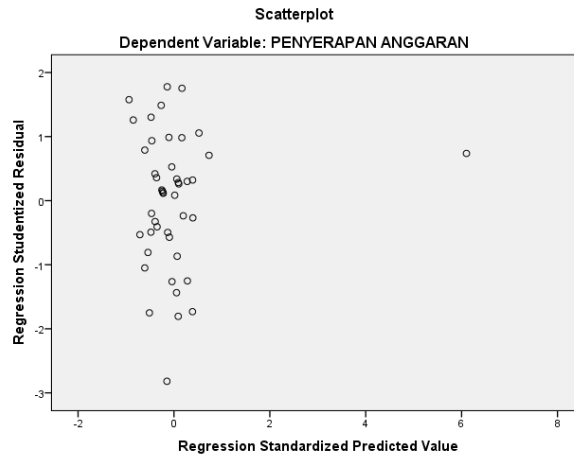
Collinearity Statistics			
Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
X1	.168	5.960	VIF <10 maka TIDAK TERJADI MULTIKOLINIERITAS
X2	.517	1.933	
X3	.678	1.474	
X4	.110	9.071	
X5	.189	5.279	

Sumber : Data Olahan SPSS 21, 2015

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi.

- 2) Heteroskedastisitas (variansi error konstan). Heteroskedastisitas adalah variansi dari error model regresi tidak konstan atau variansi antar error yang satu dengan yang lain berbeda (Widarjono: 115) :

Gambar 1



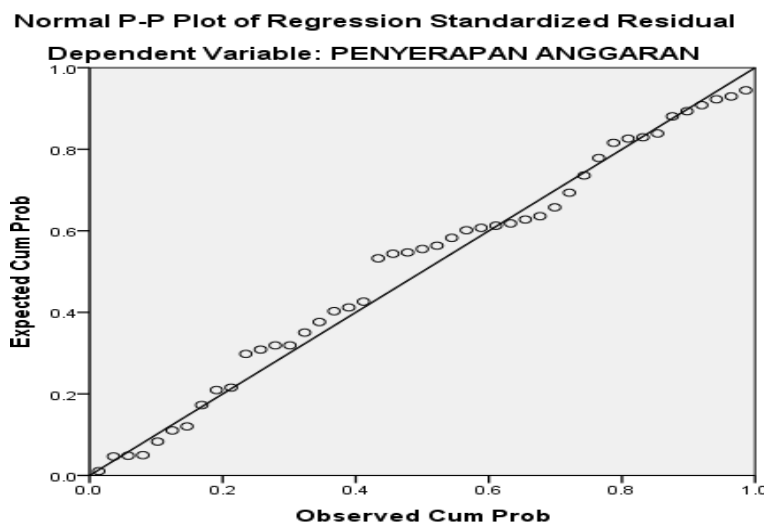
Sumber : Data Olahan SPSS 21, 2015

Dari gambar grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas.

3) Normalitas (error berdistribusi normal)

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jawaban responden terdistribusi normal. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal grafik *P-P Regression Standardized Residuals*.

Gambar 2



Sumber : Data Olahan SPSS 21, 2015

Dari grafik hasil penelitian ini disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji R2 dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

- 4) Autokorelasi (*error* bersifat acak). Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Autokorelasi seringkali terjadi pada data time series dan dapat juga terjadi pada data cross section tetapi jarang (Widarjono: 140). Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin –Watson :

- a) Bila angka Durbin – Watson berada dibawah -2, berarti ada autokorelasi.
- b) Bila angka Durbin – Watson diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Bila angka Durbin – Watson diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif

Berdasarkan nilai Statistic *Durbin-Watson* sebagai hasil output dari SPSS version 21.0 sebesar 1.673. Hal ini telah membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi

Pembahasan Hasil penelitian

1. Pengaruh Faktor-faktor Keterlambatan Penyusunan dan Penetapan APBD terhadap Penyerapan Anggaran SKPD Kabupaten Boven Digoel

- a. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Sumber daya manusia adalah semua orang yang tergabung dalam suatu organisasi dengan peran dan sumbangannya masing-masing akan mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Variabel X_1 yaitu Sumber Daya Manusia sebagai salah satu variable keterlambatan penyusunan APBD berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Boven Digoel. Pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai penyusunan anggaran sudah sangat memadai. Pemerintah daerah selalu melaksanakan sosialisasi tentang sistem penganggaran sesuai peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran APBD. Sehingga dengan demikian diharapkan kapasitas Sumber Daya Manusia akan semakin memadai sehingga penyerapan anggaran dapat lebih baik dan program yang sudah di susun dapat dijalankan sesuai rencana yang sudah disusun oleh SKPD di Kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Dinas Pertanian tahun 2014 memiliki tingkat penyerapan anggaran sebesar 80%. Dengan adanya keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD penyerapan anggaran tidak mencapai 100%, namun ada beberapa program yang sudah mencapai target kinerja misalnya Program Pemberdayaan

Penyuluh dan petugas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana penyuluh dan petugas. Kegiatan ini bersumber dari DAK dan DAU dengan target sebesar 100% dengan total dana yang digunakan sebesar Rp1.321.536.000,00 Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia sudah baik sehingga penyerapan anggaran dapat terserap dengan baik

b. Pengaruh Hubungan Eksekutif dan Legislatif terhadap Penyerapan Anggaran

Tahapan penyusunan APBD selalu berhubungan dengan interaksi antara Eksekutif dan Legislatif karena dalam penyusunan APBD kedua pihak tersebut berperan dan menunjukkan kesepakatan maupun kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Namun, bila sebaliknya hubungan eksekutif dan Legislatif tidak berjalan dengan baik dapat berpengaruh buruk pada penyusunan APBD. Dengan adanya hubungan yang baik tersebut maka APBD menjadi tepat waktu untuk disusun dan ditetapkan sehingga penyerapan anggaran akan semakin baik.

Berdasarkan hasil penelitian, Variabel X_2 yaitu hubungan Eksekutif dan legislative sebagai salah satu variable keterlambatan penyusunan APBD mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Boven Digoel. Sehingga apabila Hubungan Legislatif dan Eksekutif semakin baik maka penyerapan anggaran akan semakin rendah dan sebaliknya jika Hubungan Eksekutif dan Legislatif tidak berjalan dengan baik akan meningkatkan penyerapan anggaran.

Berdasarkan kondisi politik di Kabupaten Boven Digoel dimana selama beberapa tahun (2011-2014) Jabatan Bupati masih merupakan Pelaksana Tugas yang dijabat oleh Wakil Bupati merupakan salah satu penyebab adanya hubungan yang kurang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif sehingga kurang sepakat dalam penyusunan APBD. Namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Boven Digoel kondisi penyerapan anggaran tidak mengalami penurunan bahkan mengindikasikan adanya penyerapan yang baik. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan APBD, pihak Eksekutif dan Legislatif tidak terlibat langsung karena terdapat pihak ketiga seperti kontraktor atau pihak swasta yang melaksanakan kegiatan yang sudah disusun dalam APBD sehingga hasil penyerapan anggaran tergantung dari kinerja dari pihak kontraktor maupun pihak swasta tersebut.

Pada Dinas Pertanian Kabupaten Boven Digoel yang memiliki pagu sebesar Rp23.554.202.678,00 dengan realisasi anggaran sebesar yang memiliki 13 program yang terdiri dari 42 kegiatan (*DPA Dinas Pertanian kabupaten Boven Digoel*) dimana dalam

pelaksanaannya beberapa kegiatan seperti Pengadaan fisik alat-alat pertanian di lakukan oleh pihak kontraktor atau swasta sedangkan seperti pelatihan maupun penyuluhan biasa dilakukan oleh SKPD itu sendiri.

c. Pengaruh Faktor Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang terbit tiap tahun seringkali mengatur hal-hal yang sangat rinci, yang membuat Pemerintah Daerah harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Variabel X_3 yaitu Faktor Regulasi sebagai salah satu variable keterlambatan penyusunan APBD mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Boven Digoel.

Dengan semakin baiknya regulasi dan pemahaman Pemerintah daerah dan SKPD maka akan meningkatkan penyerapan anggaran. Namun Faktor Regulasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran karena terdapat banyak factor lain yaitu adanya keterlambatan penerbitan peraturan terkait dana dari pemerintah atasan serta berubah-ubahnya alokasi maupun peruntukannya, menjadi kendala dalam penyusunan APBD, sehingga tentunya akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini sering terjadi pada dana-dana yang bersifat *specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Gubernur. Namun adanya perubahan tidak berpengaruh dan menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal. Berdasarkan DPA Dinas Pertanian Kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus yaitu Pembangunan sarana dan prasarana Pembibitan Ternak yang mencapai target kinerja 100% dengan total dana Rp 55.000.000,00

d. Pengaruh Indikator Kinerja terhadap Penyerapan Anggaran

Salah satu instrumen penting dalam APBD adalah indikator kinerja. Indikator kinerja menunjukkan tingkat yang dicapai dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan dari organisasi sektor publik. Indikator kinerja memiliki peran penting karena indikator ini berguna dalam penentuan kinerja yang dicapai dari pelaksanaan APBD. Indikator kinerja terdiri dari input, output, efisiensi, kualitas, dan *outcome*.

Berdasarkan hasil penelitian, Variabel X_4 yaitu Indikator Kinerja sebagai salah satu variable keterlambatan penyusunan APBD mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Boven Digoel. Adanya pengaruh yang positif menunjukkan bahwa apabila pihak SKPD maupun Pemerintah Daerah mampu dalam menerjemahkan indicator Kinerja ke dalam program yang disusun dalam APBD akan menyebabkan penyerapan anggaran semakin baik. Namun pengaruh Indikator Kinerja yang

tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran, hal ini karena dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran pihak SKPD maupun Pemerintah Daerah kurang memperhatikan penggunaan indikator kinerja dalam pelaksanaan program dan hanya dijadikan sebagai acuan

e. Pengaruh Penetapan APBD terhadap Penyerapan Anggaran

Lambatnya pengesahan APBD di daerah yang tidak tepat waktu melahirkan problematika yang cukup serius. Hal ini dikarenakan, pengesahan yang tidak tepat waktu ini akan mengakibatkan pemerintah tidak bisa mendistribusikan rencana-rencana strategis yang telah disusun dengan baik.

Penetapan APBD di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2011 mengalami keterlambatan 24 hari, tahun 2012 mengalami keterlambatan 60 hari, tahun 2013 mengalami keterlambatan selama 68 hari dan tahun 2014 mengalami keterlambatan 78 hari.

Berdasarkan hasil penelitian, Variabel X_5 yaitu Penetapan APBD sebagai salah satu variable keterlambatan penyusunan APBD mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Boven Digoel. Artinya semakin tepat APBD disusun maka Penyerapan anggaran semakin baik. Namun dengan adanya keterlambatan penetapan APBD maka akan berdampak dalam penyerapan anggaran SKPD-SKPD yang tidak mencapai 100%

f. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif dan Legislatif, Faktor Regulasi, Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian dengan Uji F, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari ke lima variable independen secara bersama-sama terhadap variable dependen. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa variable Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif dan Legislatif, Faktor Regulasi, Indikator Kinerja, dan Penetapan APBD mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Boven Digoel

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Untuk Mengatasi Keterlambatan Penyusunan APBD

- a. Upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia, dalam hal ini kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan APBD baik dari Pihak SKPD maupun kemampuan dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Upaya yang sudah dilakukan yaitu adanya pelatihan penganggaran maupun sosialisasi mengenai penyusunan APBD pada Bappeda Kabupaten Boven Digoel serta Pelatihan bagi bendahara-bendahara di SKPD Kabupaten Boven Digoel dalam mengoperasikan serta menggunakan komputer khususnya pencatatan laporan keuangan. Upaya yang perlu lagi dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel yaitu Pelatihan penyusunan anggaran

yang melibatkan semua anggota SKPD khususnya bidang-bidang yang terlibat dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD.

- b. Peran Kepala Bappeda dalam proses penyusunan APBD sangat penting karena merupakan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini menuntut tanggung jawab yang besar sehingga diharapkan memiliki kemampuan dan spesifikasi pendidikan yang menunjang tugasnya. Keterlambatan Penyusunan APBD di Kabupaten Boven Digoel terjadi karena Kepala Bappeda sebelumnya tidak memiliki basic pendidikan sebagai Perencana Daerah sehingga untuk mengatasi masalah tersebut maka Pemerintah Daerah mengganti Kepala Bappeda dengan spesifikasi pendidikan yang menunjang tugasnya.
- c. Keterlambatan Penyusunan APBD di Kabupaten Boven Digoel dari tahun 2011-2014 dipengaruhi oleh penggunaan Sistem Keuangan yang dipakai oleh Pemerintah Daerah saat itu yaitu SIAKDA yang dikelola konsultan keuangan dari pihak swasta. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam Penyusunan APBD 2015 telah merubah system keuangan dengan menggunakan Sistem Keuangan dari BPK yaitu SIMDA. Dari adanya perubahan system keuangan tersebut menyebabkan APBD 2015 tidak mengalami keterlambatan penyusunan maupun penetapan APBD.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian factor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD maka factor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan yaitu factor Sumber Daya Manusia dengan nilai koefisien sebesar 0,303 dengan nilai signifikan sebesar 0.047 dan Faktor Penetapan APBD yaitu nilai koefisien sebesar 0341 dan nilai signifikan sebesar 0,050. Faktor-faktor yang tidak mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD yaitu factor Hubungan Eksekutif dan Legislatif dengan nilai koefisien sebesar -0.067 dengan nilai signifikan 0,697, Faktor Regulasi dengan nilai koefisien 0.046 dan nilai signifikan sebesar 0.269, dan Faktor Indikator Kinerja dengan nilai koefisien 0,118 dengan nilai signifikan sebesar 0.429
2. Upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi keterlambatan yaitu adanya pelatihan penganggaran maupun sosialisasi mengenai penyusunan APBD pada Bappeda Kabupaten Boven Digoel serta Pelatihan bagi bendahara-bendahara di SKPD Kabupaten Boven Digoel, Pergantian Kepala Bappeda dengan basic pendidikan Perencanaan Daerah yang sesuai dengan tugasnya serta Pergantian Sistem Keuangan daerah dengan SIMDA.

Saran

1. Peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui workshop atau pelatihan tentang penyusunan APBD. Dalam pelaksanaan bintek tersebut perlu adanya penggabungan peserta dari TAPD, Kepala SKPD dan Anggota DPRD, hal ini dimaksudkan agar nantinya ada kesepahaman dalam mekanisme penyusunan APBD.
2. Membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif (Bupati) dalam hal ini perlu melakukan kompromi-kompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih dalam proses pengalokasian anggaran sehingga aspirasi dan kepentingan dari anggota DPRD.
3. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus selalu memperhatikan setiap peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD dan mensosialisasikannya kepada setiap SKPD yang ada dalam pemerintahannya agar dapat selalu menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan tersebut.
4. Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan penggunaan Indikator Kinerja dalam mencapai terwujudnya pelaksanaan program yang sudah disusun.
5. Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan setiap proses penyusunan APBD sesuai jadwal yang sudah ditetapkan agar Penetapan APBD dapat ditetapkan sesuai dengan waktu yang sudah di jadwalkan

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2013. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*, Manado (JURNAL)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*
- Sujarweni, V, W., dan Endrayanto, P. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Sunyoto, D. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. CAPS: Sleman, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*
- Wangi, C.A.P. dan Ritonga I.P. (2010) *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD ((Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010)*, Purwekerto (JURNAL)
- Widarjo, A., 2013. *Ekonometrika :Pengantar dan Aplikasinya*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta